

Master Model

Model Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial



**Berbasis Masalah Lingkungan
Bagi Kelompok Usia Produktif**



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(PP PAUD DAN DIKMAS) JAWABARAT**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pakar

Dr. Asep Saepudin

Mengetahui:

Kepala PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Barat,

Dr. Muhamad Hasbi, S.Sos., M.Pd

NIP 197306231993031001

Model
Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan (*Socio-Ecopreneur*)
bagi Kelompok Usia Produktif

Pengarah

Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd.

Penanggung Jawab

Drs. Dadang Trisutalaksana

Narasumber

Dr. Asep Saepudin, M.Pd.

Tim Pengembang

Ketua

Dr. Kuswara, M.Pd.

Anggota

Yuyun Nurfalah, M.Pd

Apipudin, M.Pd.

Kontributor:

PKBM Sukamulya, Kota Bandung

PKBM Al Ma'un, Kabupaten Cianjur



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS
PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Barat
Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Penyusunan model ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam pengembangan usaha dan solusi masalah lingkungan. Di samping itu, juga menjadi harapan nyata bagi pengembangan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha berbasis masalah lingkungan. Penyusunan model ini juga merupakan bagian dari revitalisasi kerusakan lingkungan berlandaskan “DOUM”, (dari, oleh, dan untuk masyarakat).

Dalam penyelenggaraan model ini, posisi pengelola PKBM/LKP memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Tentunya untuk menunjang pelayanan program yang berkualitas perlu didukung oleh penyelenggara program yang berkualitas dan kompeten pula. Oleh karena itu, adanya model ini diharapkan dapat digunakan sebagai contoh penyelenggaraan kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan secara lebih komprehensif dan teruji.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya naskah ini. Semoga karya bersama ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan PAUD dan Dikmas khususnya dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Bandung, Desember 2016
Kepala PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Barat,

Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197306231993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar.....	3
C. Tujuan.....	4
BAB 2 KONSEP MODEL	
A. Pengertian	5
B. Tujuan	6
C. Karakteristik Model	7
1. Asumsi Model	7
2. Pendekatan Model.....	7
3. Prosedur Penerapan Model	8
4. Indikator Keberhasilan	9
5. Keunggulan Model	10
6. Kebaruan Model	10
7. Keterbatasan Model	10
BAB 3 PENYELENGGARAAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS MASALAH LINGKUNGAN (<i>SOCIO-ECOPRENEUR</i>)	
A. Rasional	13
B. Komponen Model.....	15
1. Syntax	16
2. Sistem Sosial	17
3. Peran Instruktur.....	17
4. Sistem Pendukung	19
5. Bahan Ajar	19
6. Dampak Instruksional dan Pengiring	21
BAB 4 PENJAMINAN MUTU	
A. Monitoring dan Evaluasi	24
B. Tindak Lanjut	25
BAB 5 PENUTUP	
A. Simpulan	27
B. Implikasi	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian nasional dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan yang berarti. Bahkan, di tengah laju perlambatan ekonomi dunia, dan disaat negara lain mengalami resesi ekonomi akibat krisis ekonomi global yang diawali di Amerika Serikat dan menjalar ke Eropa, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terus berada di angka 6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang besar tersebut, tidak lepas dari daya beli konsumsi dalam negeri yang besar dan jumlah masyarakat berpenghasilan menengah yang semakin meningkat. Melalui pendapatan masyarakat yang besar tersebut, tentunya menjadi potensi tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya, maupun masyarakat umum yang mulai banyak melirik peluang berusaha.

Saat ini, gaung untuk menjadi pengusaha telah menjadi tren di masyarakat. *Entrepreneurship* atau kewirausahaan menjadi istilah yang seringkali didengar di kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini. Dampak positif dari menjamurnya *entrepreneurship* adalah terciptanya lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya daya saing. Berbagai usaha dan bisnis baru bermunculan bak cendawan di musim hujan. Namun demikian, persaingan bisnis yang begitu ketat, membuat sebagian pengusaha mengabaikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Pasalnya, angka pengangguran dan kemiskinan

masih terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran pada tahun 2016 mencapai 7,02 juta orang, dan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen). Melihat tren yang ada, tercipta penurunan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Namun demikian, penurunan yang terjadi berjalan lambat. Salah satu penyebabnya adalah geliat kewirausahaan yang kurang memiliki kebermanfaatan dan nilai sosial bagi masyarakat banyak. Kewirausahaan yang berjalan selama ini hanya mampu menciptakan lapangan kerja dan menciptakan hubungan dua arah (pengusaha dan pekerja). Masyarakat hanya sekedar menjadi objek menjadi pelanggan atau konsumen.

Wirausaha sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan serta signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat. Konsep wirausaha sosial memandang masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya.

Kewirausahaan sosial atau *social entrepreneurship* merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Orang yang bergerak di bidang kewirausahaan sosial disebut *social entrepreneur*. Santosa (2007) mendefinisikan *social entrepreneur* sebagai seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*education and health care*). Kewirausahaan sosial menitikberatkan usahanya sejak awal dengan melibatkan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu secara finansial maupun keterampilan untuk secara bersama-sama menggerakkan usahanya agar menghasilkan keuntungan, dan kemudian hasil usaha atau keuntungannya dikembalikan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Melalui metode tersebut, kewirausahaan sosial bukan hanya mampu menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan kesejahteraan sosial. Geliat kewirausahaan sosial seorang *social entrepreneur* adalah seseorang yang cakap dalam melihat tantangan sebagai peluang, melihat sampah menjadi uang, dan melihat masyarakat sebagai subjek bukan objek dari usahanya. Masyarakat berperan sebagai mitra strategis usahanya, bukan sekedar sebagai pelanggan atau konsumen. Pola yang terjadi dalam kewirausahaan sosial adalah antara pengusaha – pekerja – masyarakat, ketiganya bersinergi dalam membentuk simbiosis mutualisme. Dampaknya adalah kesejahteraan, keadilan sosial dan

pemerataan pendapatan. Meski terbilang baru, namun geliat kewirausahaan sosial kini sudah menjadi tren baru di kehidupan masyarakat global, tak terkecuali di Indonesia.

Bertolak dari permasalahan-permasalahan tersebut, pada tahun 2016 PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Barat mengembangkan Model Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan (*Socio-Ecopreneur*) bagi Kelompok Usia Produktif. Model penyelenggaraan kewirausahaan sosial ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam upaya mempercepat penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tak lain karena kewirausahaan sosial menawarkan kelebihan manfaat dari sekedar menciptakan lapangan kerja. Model kewirausahaan sosial dipandang memiliki kebermanfaatannya yang luas karena wirausahawan bukan hanya berhadapan kepada karyawan yang menjadi mitra kerja tetapi juga masyarakat luas.

B. Dasar Hukum

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang melandasi penyusunan model penyelenggaraan kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
5. Permendiknas RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
7. Program kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan Dikmas) Jawa Barat Tahun 2016.

C. Tujuan

1. Bagi Pendidik
Tersedia acuan dalam penyelenggaraan program PKW berbasis masalah lingkungan.
2. Bagi Pembina PKBM/LKP

Adanya acuan untuk melakukan pembinaan bagi penyelenggara program PKW dan PKBM/LKP berbasis masalah lingkungan.

3. PP-PAUD dan DIKMAS

Tersedia naskah model yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran penyelenggaraan program PKW bagi pengelola program dan pembina wilayah.

4. Direktorat PAUD dan DIKMAS

Sebagai input penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan program PKW bagi kelompok usia produktif.

PP-PAUD & DIKMAS JABP

BAB II

KONSEP MODEL

A. Pengertian

1. **Model** adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) seperti yang ditiru (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Model dalam tulisan ini adalah struktur program inovatif yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian tujuan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas.
2. **Penyelenggaraan Kewirausahaan** adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu dalam kehidupan. Kewirausahaan adalah suatu proses kreativitas dan inovasi yang mempunyai resiko tinggi untuk menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran bagi wirausahawan. **Kewirausahaan sosial** adalah kewirausahaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan sekedar memaksimalkan keuntungan pribadi. Kewirausahaan sosial biasa disebut 'pengembangan masyarakat' atau 'organisasi bertujuan sosial' atau 'pemberdayaan masyarakat' dalam balutan kegiatan usaha.
3. **Kelompok usia produktif** adalah kelompok berusia antara 18-64 tahun (BPS), dan memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha berbasis masalah sosial. Usia produktif prioritas dalam

model ini adalah usia antara 18-45 tahun, di mana seorang manusia mencapai puncak kematangan fisik dan biologis.

4. **Masalah Lingkungan** adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Pada model ini mencakup masalah lingkungan yang mengganggu aktivitas kehidupan manusia bersumber lingkungan, seperti sampah, gulma, dll.

B. Tujuan Program

Penyusunan model kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif, bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam menyelenggarakan program kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam melaksanakan kegiatan identifikasi lingkungan untuk penyelenggaraan program kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.

- b. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam melaksanakan kegiatan rekrutmen kelompok sasaran program kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.
- c. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam menyusun rencana penyelenggaraan program kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.
- d. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam melaksanakan pelatihan kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.
- e. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam melaksanakan pengembangan dan pemandirian usaha kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.
- f. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam melaksanakan pendampingan kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) yang dilaksanakan kelompok usia produktif.
- g. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam mengevaluasi

pelaksanaan kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) yang dilaksanakan kelompok usia produktif.

- h. Memberikan acuan kepada pengelola dan instruktur pada satuan pendidikan PKBM/LKP dalam melaksanakan tindak lanjut program kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan (*socio-ecopreneur*) bagi kelompok usia produktif.

C. Karakteristik Program

1. Asumsi Model

Asumsi 1: Pengembangan kewirausahaan sosial merupakan proses berkelanjutan sepanjang masalah sosial itu tetap ada.

Asumsi 2 : Program kewirausahaan sosial merupakan instrumen alternatif dalam pengembangan wirausaha masyarakat.

Asumsi 3 : Pemanfaatan masalah lingkungan dalam pembelajaran kewirausahaan sosial memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembelajaran.

Asumsi 4 : Peserta didik menjadi lebih sadar, mengerti, dan peka melalui interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dalam pembelajaran.

2. Pendekatan Model

Pengembangan model pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa, pendekatan partisipatif, pendekatan

masalah lingkungan, dan pendekatan kolaboratif serta berkelanjutan.

3. Prosedur Penerapan Model

Langkah-langkah penerapan model kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan ini dapat diterapkan dengan prosedur sebagai berikut:

Tabel 2.1

Langkah-Langkah Penerapan Model

No.	Tahap	Langkah
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">a. Mengadakan survei lapangan.b. Analisis masalah sosial/lingkunganc. Menganalisis kebijakan. nasional tentang program wirausaha sosial.d. Mengenal masyarakat, di mana kelompok sasaran tersebut berada.e. Studi mengenai aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi, dan sosial masyarakat.f. Menerapkan Teknik PRA (<i>Participatory Rural Appraisal</i>).g. Penyusunan kurikulum pembelajaran.h. Mempelajari rencana pembelajaran yang telah disepakati.i. Mengembangkan media pembelajaran.

		<ul style="list-style-type: none"> j. Merancang dan mengembangkan bahan ajar. k. Merancang teknik penyampaian (<i>delivery system</i>). l. Uji-coba bahan ajar. m. Menetapkan teknik evaluasi. n. Melatih instruktur. o. Melatih fasilitator.
2	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan pola pembelajaran kewirausahaan sosial dengan lima (5) langkah, yaitu: <i>Pertama</i>, pemahaman konsep wirausaha sosial. <i>Kedua</i>, penyajian wacana berorientasi masalah sosial dan masalah usaha. <i>Ketiga</i>, pemaknaan masalah lingkungan. <i>Keempat</i>, pembimbingan belajar usaha. <i>Kelima</i>, evaluasi hasil usaha. b. Pemanfaatan masalah lingkungan berdasarkan analisis masalah dan potensi wilayah. c. Pemantauan kegiatan usaha sesuai dengan kerangka model.
3	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi pra-pembelajaran. b. Evaluasi proses pembelajaran. c. Evaluasi pasca-pembelajaran.

4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penerapan model pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Program merupakan layanan kebutuhan khusus peserta didik dan berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pengembangan masyarakat sekitar.
- b. Pengelola program mengidentifikasi dan menggunakan semua sumber daya program seperti, manusia, panti belajar, sarana dan prasarana, serta dana.
- c. Anggota masyarakat memiliki kemampuan dan komitmen untuk merencanakan, melaksanakan, dan melanjutkan program.
- d. Program yang dilaksanakan didukung oleh lembaga-lembaga dan organisasi baik dari dalam maupun dari luar masyarakat.

5. Keunggulan Model

- a. Pengembangan wirausaha yang dilakukan bagian dari solusi masalah lingkungan.
- b. Sasaran program adalah kelompok pemuda produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengentaskan pengangguran.
- c. Kegiatan usaha tidak hanya mengejar profit (keuntungan), tetapi juga sebagai layanan sosial.
- d. Penyelenggaraan usaha dapat diintegrasikan dengan program pendidikan kecakawan wirausaha (PKW).

6. Kebaruan Model

- a. Menyelesaikan dua inti permasalahan sosial sekaligus, yaitu: 1) pengangguran, dan 2) lingkungan.
- b. Paradigma model adalah mengubah masalah menjadi peluang.
- c. Model bersifat komprehensif; prosedur penyelenggaraan dan perangkat pembelajarannya sudah dikembangkan.

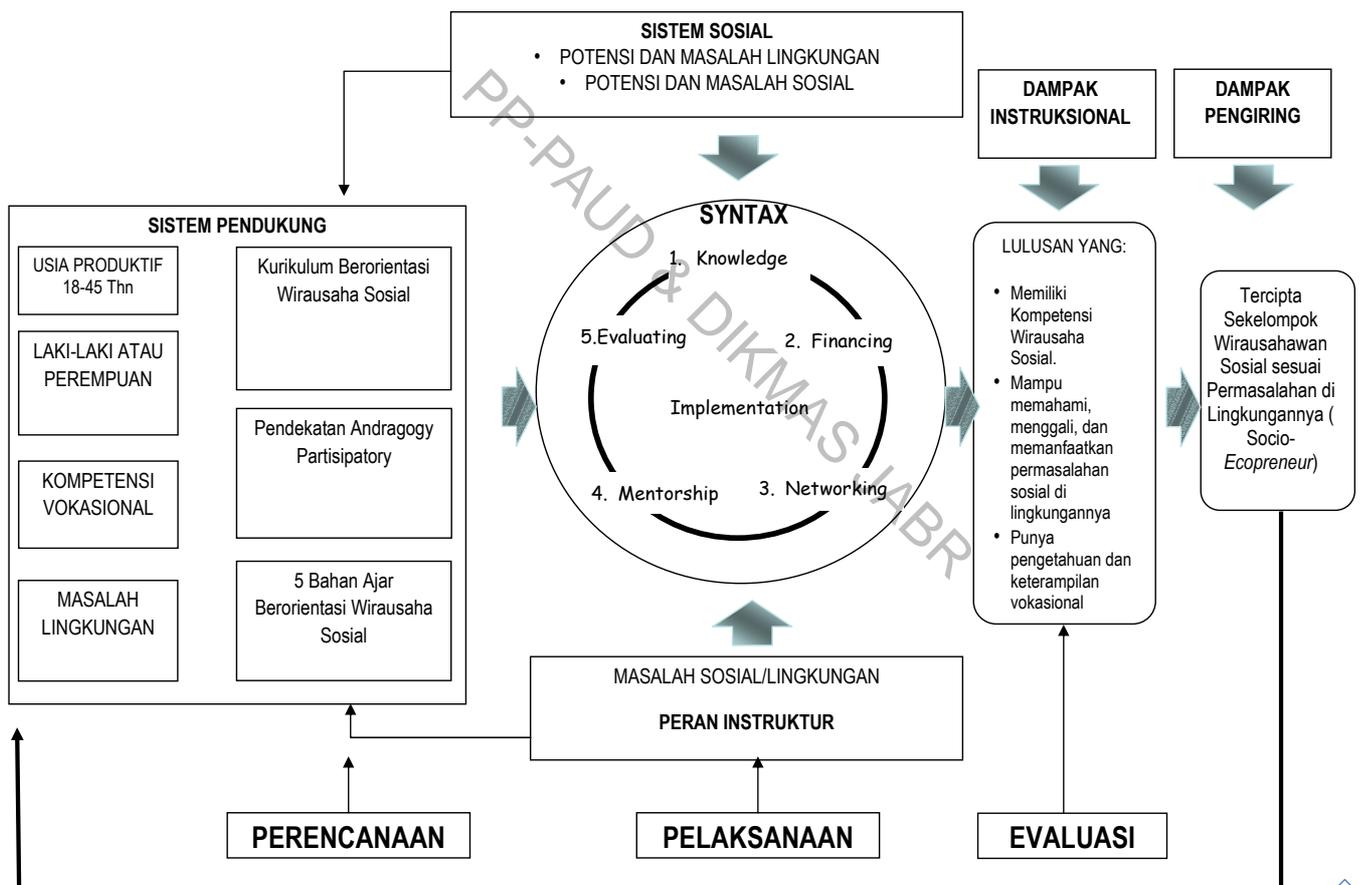
7. Keterbatasan Model

- a. Model ini diujicobakan dalam latar masalah lingkungan tertentu sesuai lokasi uji coba dilakukan sehingga belum tentu cocok jika diterapkan pada kelompok masyarakat dengan masalah lingkungan yang berbeda.
- b. Perlu kehati-hatian dalam pemilihan masalah lingkungan yang akan dikembangkan menjadi kegiatan usaha.
- c. Peserta didik tidak 100% (seratus persen) mampu mengembangkan masalah lingkungan menjadi kegiatan wirausaha.
- d. Kesulitan dalam penyiapan bahan baku yang sesuai dengan kegiatan usaha.
- e. Kesulitan dalam mencari sosok/tokoh penggerak/insiator program.

BAB III
MODEL KEWIRAUSAHAAN SOSIAL BERBASIS MASALAH LINGKUNGAN
(SOCIO-ECOPRENEUR)

Model akhir disusun berdasarkan masukan dari pakar, praktisi, dan pengguna model dalam uji coba yang dilakukan. Bentuk model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

PP-PAUD & DIKMAS JABP



Model Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan Bagi Kelompok Usia Produktif, PP PAUD dan DIKMAS Jawa Barat, 2016

Gambar 1: Kerangka Model Akhir Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Sosial bagi Kelompok Usia Produktif

Berdasarkan kerangka model di atas, dapat dijelaskan aspek-aspek komponen model seperti berikut ini.

A. Rasional

Tujuan pembangunan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata. Baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan juga keselarasan, keserasian dan keseimbangan diantara keduanya.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (Laporan Pembangunan Manusia, 1990)

Beberapa kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan.

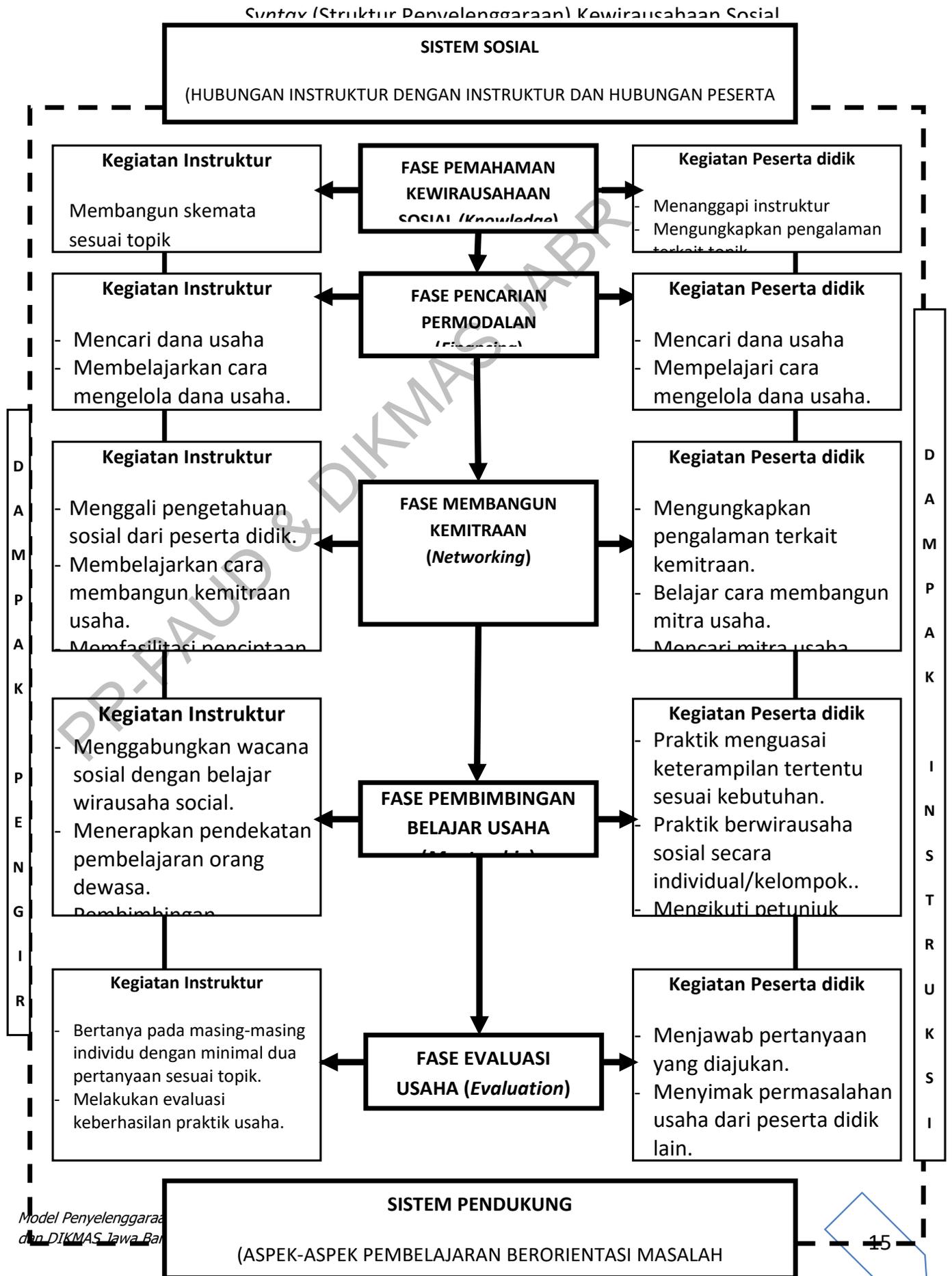
Konsep wirausaha sosial memandang masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang

menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya.

Wirausaha sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan serta signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat. Kajian mengenai kewirausahaan sosial melibatkan berbagai ilmu pengetahuan dalam pengembangan serta praktiknya di lapangan. Lintas ilmu pengetahuan yang diadopsi kajian kewirausahaan sosial merupakan hal penting untuk menjelaskan serta membuat pemikiran-pemikiran baru.

Bertolak dari permasalahan-permasalahan tersebut, pada tahun 2016 PP-PAUD dan DIKMAS Jawa Barat mengembangkan Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Masalah Lingkungan bagi Kelompok Usia Produktif, seperti yang disajikan dalam gambar pada halaman berikut:

Gambar 3:1



B. Komponen Model

Aspek-aspek komponen model program pembelajaran kewirausahaan sosial yang dikembangkan ini sebagai berikut:

1. *Syntax* (Struktur Pembelajaran)

Struktur dalam model pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan memiliki beberapa tahapan, yaitu:

Fase pertama, pemahaman konsep wirausaha sosial-peserta didik dikondisikan dengan cara instruktur membangun pengetahuan terkait wirausaha sosial, sedangkan peserta didik menanggapi instruktur dan mengungkapkan pengalaman terkait topik.

-*Fase kedua*, pencarian permodalan (*financing*), yaitu dengan kewajiban instruktur untuk mencari dana usaha dan membelajarkan cara mengelola dana usaha, sedangkan peserta didik melakukan seperti yang diarahkan oleh instruktur.

-*Fase ketiga*, membangun kemitraan (*networking*), yaitu dengan dibimbing instruktur atau mentor menggali pengetahuan sosial dari peserta didik, belajar cara membangun kemitraan usaha, dan fasilitasi penciptaan jalinan kemitraan, peserta didik mengikuti seperti yang diarahkan oleh instruktur.

- *Fase keempat*, pembimbingan belajar usaha (*mentorship*), dibimbing oleh mentor peserta didik melakukan Menggabungkan wacana sosial dengan belajar wirausaha sosial, menerapkan pendekatan pembelajaran orang dewasa, dan pembimbingan individual/ kelompok usaha.

-*Fase kelima*, evaluasi hasil usaha (*evaluation*), peserta didik melakukan evaluasi hasil usaha secara mandiri atau dibimbing oleh mentor, yaitu: bertanya pada masing-masing individu dengan minimal dua pertanyaan sesuai jenis usaha yang dilakukan dan melakukan evaluasi keberhasilan praktik usaha, serta peserta didik melakukan evaluasi usaha secara mandiri.

Fase Pertama		Fase Kedua	Fase Ketiga
Pemahaman Wirausaha (<i>Knowledge</i>)	Konsep Sosial	Pencarian Permodalan (<i>Financing</i>)	Membangun Kemitraan (<i>Networking</i>)
Fase Keempat		Fase Kelima	
Pembimbingan Belajar Usaha (<i>Mentorship</i>)		Evaluasi Hasil Usaha (<i>Evaluating</i>)	

2. Sistem Sosial

a. Hubungan Instruktur dengan Peserta didik

- Instruktur harus dengan sengaja memilih jenis kegiatan dan mengatur peserta didik dengan merancang kegiatan yang utuh dan padat mengenai suatu masalah lingkungan.
- Instruktur harus mengkondisikan adanya proses timbal-balik pengalaman antara instruktur dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, dalam kerangka pembelajaran usaha berbasis masalah lingkungan.
- Instruktur harus menyuguhkan suasana kekeluargaan di antara peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan instruktur, sehingga interaksi pembelajaran menjadi lebih cair.

b. Hubungan Peserta didik dengan Peserta didik

- Peserta didik harus merasa akrab belajar bersama teman-teman peserta didik lainnya.
- Peserta didik harus merasa dihargai ketika berinteraksi dengan teman-teman peserta didik lainnya.
- Peserta didik harus merasa tidak didominasi oleh warga belajar lain selama proses pembelajaran.
- Peserta didik harus bisa memahami dengan hati lapang jika ada kritik dari peserta didik lainnya.

3. Peran/Tugas Instruktur

Instruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran wirausaha sosial. Setidaknya terdapat tiga peran utama yang harus dilakukan seorang instruktur dalam pembelajaran, di antara peran strategis instruktur dalam pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Perencana Pembelajaran

Instruktur harus mempersiapkan dan mempunyai wawasan yang cukup memadai, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam merancang program pembelajaran yang akan disajikan. Perencanaan yang dibuat, merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan.

Persiapan proses pembelajaran menyangkut pula penyusunan desain (rancangan) kegiatan belajar-mengajar yang akan diselenggarakan, didalamnya meliputi: tujuan, metode, media, sumber, evaluasi, dan kegiatan belajar peserta didik.

Perencanaan ini meliputi:

- Tujuan apa yang hendak dicapai, yaitu bentuk-bentuk tingkahlaku apa yang dapat dicapai atau dapat dimiliki oleh peserta didik setelah terjadinya proses belajar mengajar.
- Bahan pelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan.
- Bagaimana proses belajar mengajar yang akan diciptakan oleh instruktur agar peserta didik mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

- Bagaimana menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan itu tercapai atau tidak.

b. Pelaksana (Pengelolaan) Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran menggambarkan dinamika kegiatan belajar peserta didik yang dipandu dan dibuat dinamis oleh instruktur. Situasi yang dihadapi instruktur dalam melaksanakan pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar itu sendiri. Untuk itu, instruktur dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dalam mengaplikasikan metodologi dan pendekatan pembelajaran secara tepat yang dikombinasikan dengan kemampuan dalam memahami dinamika perilaku dan perkembangan yang sedang dialami oleh para peserta didik. Dalam keseluruhan proses pembelajaran, instruktur bertugas dan bertanggung jawab atas terpeliharannya suasana belajar dengan cara menunjukkan sikap yang mendukung dan tidak bersikap menilai.

c. Penilai dan Pemberi Balikan

Instruktur sebagai pemberi balikan mempunyai fungsi untuk membantu peserta didik memelihara minat dan antusias peserta didik dalam melaksanakan tugas belajar. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa belajar itu ditandai oleh adanya keberhasilan dan kegagalan. Bila hal ini diketahui peserta didik akan membawa dampak berupa hadiah dan hukuman. Selanjutnya dikemukakan bahwa upaya memberikan balikan harus dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian, minat dan antusias peserta didik dalam belajar selalu terpelihara, upaya itu dapat dilakukan dengan jalan melakukan evaluasi dan hasilnya harus diberitahukan kepada peserta didik yang bersangkutan, sehingga evaluasi itu berfungsi sebagai balikan, baik bagi instruktur maupun bagi peserta didik.

4. Sistem Pendukung

a. Kelompok Sasaran

Model pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan dapat diterapkan pada peserta didik dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok usia produktif
- 2) Belum bekerja atau tidak memiliki pekerjaan
- 3) Tinggal di lingkungan yang memiliki masalah lingkungan
- 4) Tidak sedang mengikuti program sejenis
- 5) Usia antara 18-45 tahun

b. Metode Pembelajaran

Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model pembelajaran kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan ini adalah pendekatan andragogi, partisipatoris dengan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan praktik.

c. Kurikulum Pembelajaran

Identifikasi kebutuhan peserta didik menunjukkan ada 3 (tiga) aspek yang perlu dilakukan penguatan yaitu: (a) aspek personal, berupa ketidakmampuan peserta didik dalam mengembangkan wirausaha, (b) aspek sosial, berupa keterbatasan instruktur dalam informasi dan pengetahuan tentang cara memanfaatkan masalah lingkungan sebagai muatan pembelajaran, dan (c) aspek pemberdayaan diri, berupa kecakapan kewirausahaan sosial yang mampu menguatkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan peserta didik sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang lebih luas.

Dengan memperhatikan hasil identifikasi tersebut dan mempertimbangkan kondisi lokal maka disusun isi kurikulum yang difokuskan pada pengembangan kecakapan individu, kecakapan sosial,

dan pengembangan pemberdayaan yang diintegrasikan dengan pembelajaran yang berorientasi masalah lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun kriteria isi kurikulum pendidikan kewirausahaan sosial sebagai berikut:

- 1) Strategi pembelajaran dengan memperbanyak praktik pengembangan usaha melalui pemanfaatan masalah lingkungan yang lebih diarahkan pada pemahaman berbagai informasi dan pengungkapan gagasan baik secara lisan maupun tertulis.
- 2) Menjadikan aspek-aspek masalah lingkungan sebagai masukan pokok pengembangan kurikulum, seperti aspek:

1	Mengenal Konsep Kewirausahaan Sosial
2	Mengidentifikasi Ide dan Peluang Wirausaha Sosial
3	Menyusun Rencana Usaha
4	Mengevaluasi Hasil Usaha
5	Menerapkan Strategi Pemasaran Usaha

- 3) Untuk tema kurikulum, hal-hal yang dikemukakan mencakup:
 - (a) Konsep wirausaha sosial
 - (b) Ide dan peluang wirausaha sosial
 - (c) Penyusunan rencana usaha
 - (d) Evaluasi hasil usaha
 - (e) Strategi pemasaran usaha

d. Bahan Ajar

- Bahan ajar menggunakan berbagai pengalaman dan praktik sosial sebagai bahan/materi pembelajaran agar memberi manfaat langsung bagi peserta didik.
- Berbagai potensi sumber daya di bidang masalah lingkungan dapat dijadikan sebagai bahan belajar dalam program pembelajaran.

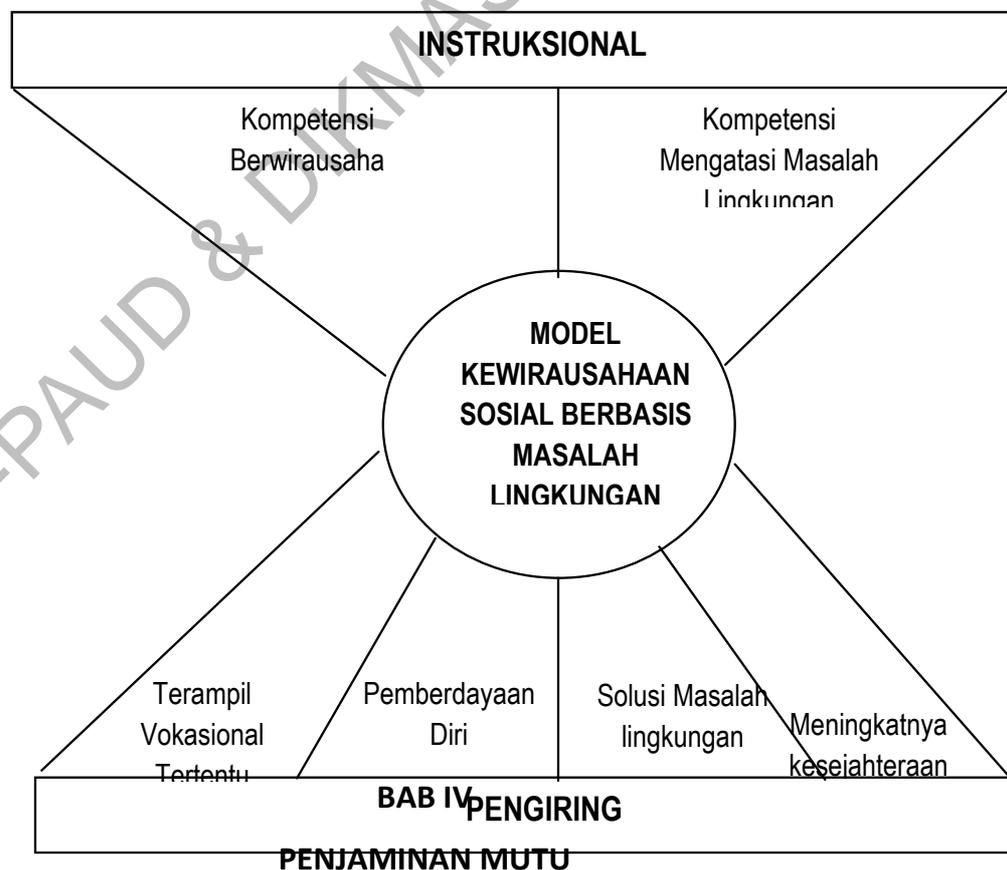
- Pengembangan bahan yang sesuai dengan kebutuhan, menjadi salah satu aspek inti program ini. Secara rinci, bahan ajar ini mencakup:
 - 1) Modul Wirausaha Sosial
 - 2) Modul Ide dan Peluang Wirausaha Sosial
 - 3) Modul Penyusunan Rencana Usaha
 - 4) Modul Evaluasi Hasil Usaha
 - 5) Modul Strategi Pemasaran Usaha
- e. Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang dapat digunakan di antaranya: poster, poster seri, booklet, atau sticker.
- f. Waktu Pembelajaran
Pembelajaran dilaksanakan selama 200 jam pelajaran dengan @60 menit per pertemuan. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 3 bulan.
- g. Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Jenis, bentuk, dan pola dukungan sarana dan prasarana harus bervariasi, mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai ke yang paling kompleks dan mahal. ATK peserta didik, dan ATK pembelajaran, seperti papan tulis, penghapus, dan penerangan harus disiapkan sesuai kebutuhan. Tempat pembelajaran bisa menggunakan ruang sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, atau PKBM/LKP setempat.
- h. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan; (a) evaluasi pra-pembelajaran, (b) evaluasi proses pembelajaran, dan (c) evaluasi akhir pembelajaran. Pada dasarnya, evaluasi dilakukan pada aspek-aspek; (a) pemahaman konsep wirausaha sosial, (b) kemampuan menggali ide dan peluang wirausaha sosial, (c) kemampuan penyusunan rencana usaha, (d) kemampuan evaluasi hasil usaha, dan (e) kemampuan pemasaran usaha.

5. Dampak Instruksional dan Pengiring

- a. Kompetensi Berwirausaha
 - a. Kemampuan dalam merencanakan usaha.
 - b. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil usaha.
 - c. Kemampuan dalam memasarkan hasil usaha.
- b. Kompetensi Membuat Solusi Masalah Lingkungan
 - a. Kemampuan memahami masalah sosial di lingkungannya.
 - b. Kemampuan memilih solusi masalah sosial di lingkungannya.
 - c. Kemampuan menggerakkan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya.
- c. Keterampilan Vokasional Tertentu
 - a. Memanfaatkan keterampilan baru yang sesuai dengan masalah sosial dan lingkungan setempat.
 - b. Memanfaatkan bantuan dana untuk modal awal dalam pengembangan usaha yang sesuai masalah sosial dan lingkungan setempat.
 - c. Kemampuan merencanakan dan mengorganisasi aktivitas kegiatan keterampilan secara berkelompok.
- d. Pemberdayaan Diri
 - a. Kemampuan berkomunikasi dan menerima individu lain yang bukan berasal dari sosial yang sama.
 - b. Kesadaran perlunya mengubah kondisi kehidupan yang kurang menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain.
 - c. Kesiediaan untuk saling belajar dan berusaha dalam bentuk kelompok.
 - d. Kesiediaan untuk saling mengenal antar peserta didik.
 - e. Kesiediaan untuk berupaya membangun hubungan baik dengan sumber belajar.

- f. Kesiediaan untuk berusaha saling mendukung untuk kemajuan belajar dan kebersamaan.
- g. Tanggap mengatasi masalah kelompok.
- h. Kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik melalui belajar dari sumber belajar.

Dampak pembelajaran dan dampak ikutan di atas dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan model Kewirausahaan Sosial yang sedang diimplementasikan, untuk mengetahui kesenjangan antara model konseptual dengan praktik penerapannya. Dengan mengetahui

kebutuhan ini implementasi model dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui misalnya berapa jumlah tenaga yang perlu ditambahkan atau dikurangi, alat atau fasilitas apa yang perlu disiapkan untuk implementasi model tersebut secara utuh, berapa lama tambahan waktu dibutuhkan, dan seterusnya.

Selanjutnya, informasi yang diperoleh dipertimbangkan sebagai bahan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan model, keputusan tentang komponen input pada model, implementasi model yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain.

Secara umum tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah;

1. Mengkaji apakah tahapan-tahapan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan konsep model.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul saat implementasi model agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola penerapan model yang dipraktikkan sudah sesuai untuk mencapai tujuan model.
4. Mengetahui kaitan antara program dengan tujuan model untuk memperoleh ukuran kemajuan.
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan model yang diimplementasikan.

Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya keberlanjutan kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut.

1. **Tahap Perencanaan:** Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu, serta pasti dulu batasannya dan definisinya.
2. **Tahap Pelaksanaan:** monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar (*variable*) yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan monitoring tersebut. Adapun indikator umum yang diukur dalam melihat capaian pekerjaan antara lain adalah :
 - ü Kesuaian dengan tujuan model.
 - ü Tingkat capaian sesuai indikator keberhasilan.
 - ü Adanya tahapan evaluasi dan alat evaluasinya;
 - ü Kesesuaian langkah-langkah penerapan dengan alat evaluasi;
 - ü Kesesuaian evaluasi dengan tujuan model;
 - ü Ketetapan dan pengelolaan waktu;
 - ü Adanya tindak lanjut dari implementasi model tersebut;

3. Tahap Pelaporan

Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan tentang program.

B. Tindak Lanjut

- a. Diperlukan penguatan-penguatan dalam frekuensi kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi program.

- b. Perlu adanya kelengkapan sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam program Kewirausahaan Sosial sehingga program dapat berjalan secara optimal.
- c. Perlu dilakukan uji coba yang lebih komprehensif sehingga Model Kewirausahaan Sosial, ini dapat diujicobakan secara lengkap dan teruji.
- d. Model ini dapat dijadikan rujukan oleh pemangku kepentingan dalam memfasilitasi layanan PNF bagi masyarakat di wilayah yang memiliki masalah-masalah sosial dan lingkungan yang perlu segera diatasi sehingga program diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pemangku kepentingan yang menggunakan model ini sebagai acuan harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan menyesuaikan dengan keadaan alam, lingkungan, budaya dan adat istiadat setempat, sehingga akan memudahkan warga masyarakat untuk mengembangkan dirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan model ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam pengembangan usaha dan solusi masalah lingkungan. Di samping itu, juga menjadi harapan nyata bagi pengembangan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha berbasis masalah lingkungan. Penyusunan model ini juga merupakan bagian dari revitalisasi kerusakan lingkungan berlandaskan “DOUM”, (dari, oleh, dan untuk masyarakat).

Dalam penyelenggaraan model ini, posisi pengelola PKBM/LKP memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Tentunya untuk menunjang pelayanan program yang berkualitas perlu didukung oleh penyelenggara program yang berkualitas dan kompeten pula. Oleh karena itu, adanya model ini diharapkan dapat digunakan sebagai contoh penyelenggaraan kewirausahaan sosial berbasis masalah lingkungan secara lebih komprehensif dan teruji.

B. Implikasi

- a. Pengembangan penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, karena proses yang dilakukan bukan hanya pekerjaan satu-dua orang saja, tetapi melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak perannya sangat dibutuhkan, selain itu perannya saling terkait dan saling melengkapi.
- b. Dalam melaksanakan program kewirausahaan sosial memerlukan kesiapan SDM yang berkualitas, yang utamanya harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemampuan fungsional yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Susanto. 2007. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : The Jakarta Consulting Group, hal. 54
- Appanah, S. Dev., dan Estin, Brooke. (2009). '*Social Entrepreneurship Definition Matrix*'. www.changefusion.com
- Arif, Z dan W.P. Napitupulu. 1997. *Pedoman Baru Menyusun Bahan Belajar*. Bandung: Gramedia.
- Boschee, Jerr., dan McClurg, Jim. (2003). '*Toward a Better Understanding of Social Entrepreneurship*'. http://www.se-lliance.org/better_understanding.pdf
- Comb, H & Manzoor, A. 1973. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*. Bank Dunia.
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 23
- Jerry Z. Muller 2002. *The Mind and The Market*. Alfred A. Knopf: New York. Page. 78
- John Elkington & Pamela Hartigan, *The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World Chapter 1: Creating Successful Business Models*. USA: Harvard business school press. page. 76
- Freire, P. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia.
- Freire, P. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Karen Braun, *Social Entrepreneurship: Perspectives on an Academic Discipline. Theory in Action*, Vol. 2, No. 2, April 2009.
- Kartono, Kartini. 1988. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Kindervatter, S. 1979. *NonFormal Education: As An Empowering Process*. Amherst Mass: Center for International Education University Of Massachusetts: Printers in The United Stated of America
- Knowles, S.M. 1977. *The Modern Practice of Adult Education. Andragogy Versus Pedagogy*, New York: Association Press.

- Peter Drucker, 1985. *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York: William Heinemann Ltd. hlm. 67
- Martin, Roger L. & Sally Osberg. 2007. *Social Entrepreneurship: The Case for Definition*. Leland Stanford Jr. University
- Roger.L . Martin & Sally Osberg. *Social Entrepreneurship: The Case For Definition*. 2007. *Stanford Social Innovation Review*. Jr,University.page 3-4
- Suryadi, Ace. 1999. *Pendidikan, Investasi, SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tan, Wee-Ling., Williams, John., dan Tan, Teck-Meng. (2005). *'Defining the 'Sosial' in 'Sosial Entrepreneurship': Altruism and Entrepreneurship'*. *International Entrepreneurship and Management Journal* 1, pp 353-365.
- Wahyudi, Isa & Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang : In-Trans Publishing
- Vasudha Vasakaria. *A Study on Social Entrepreneurship and the Characteristics of Social Entrepreneur*, *The Icfaian Journal of Management Research*, Vol. VII, No. 4, 2008. Hlm. 35